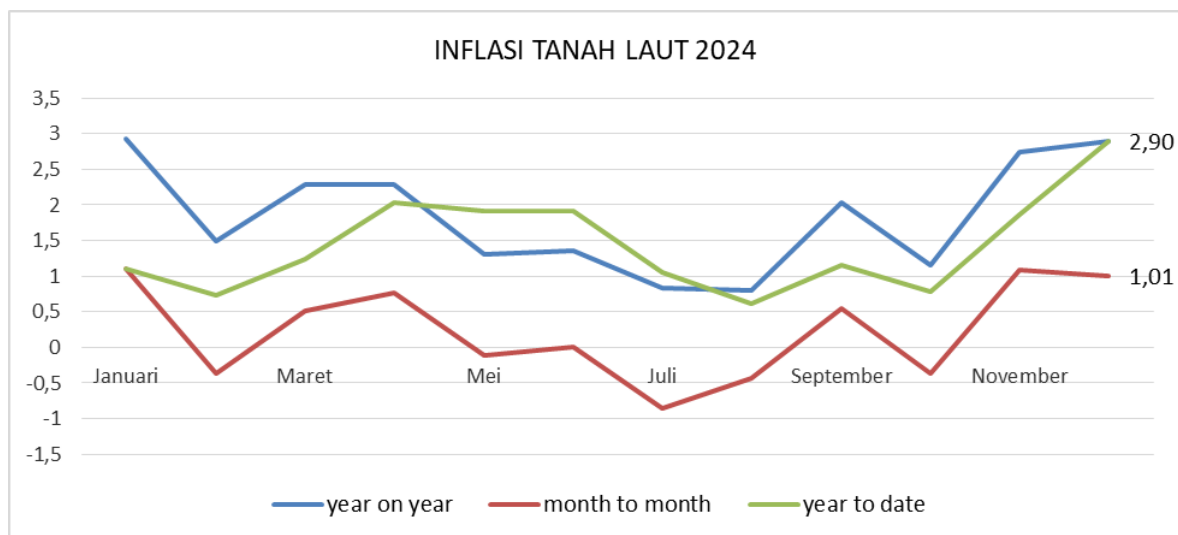


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan.
2. pada Desember 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,90 %, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,62 pada Desember 2023 menjadi 106,63 pada Desember 2024. Secara month to month (m-to-m), Kabupaten Tanah Laut mengalami inflasi sebesar 1,01 % pada bulan Desember 2024. Sementara itu, tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kabupaten Tanah Laut bulan Desember 2024 adalah sebesar 2,90 %.
3. Inflasi desember 2024 merupakan inflasi tertinggi kedua setelah inflasi januari 2024 (2,93) pada tahun 2024.
4. Penyumbang utama inflasi bulan Desember 2024 secara *m-to-m* adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil sebesar 1,01%. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain ikan gabus, cabai rawit, bayam, sawi hijau, dan terong.



2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga konsumen pada tujuh dari sebelas kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,27 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,60 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,88 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,80 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,36 persen; kelompok transportasi sebesar 0,21 persen; dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,13 persen
2. Penyumbang utama inflasi tahunan pada bulan Desember 2024 secara *y-on-y* adalah:
  - a. Kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 2,40%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah ikan gabus, daging ayam ras, udang basah, minyak goreng, dan bawang merah.
  - b. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,20%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan.

Kelompok penyediaan makanan minuman dan restoran dengan andil 0,26 %.

c.

Komoditas penyumbang utama adalah nasi dengan lauk, es, dan bubur.

3. Kegiatan pengendalian inflasi di Kabupaten Tanah Laut khususnya pada sektor distribusi barang dan jasa masih bersifat penanganan jangka pendek seperti pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar.
4. Masih tergantungnya pasokan dari luar daerah dan luar pulau untuk beberapa produk pangan masih menjadi permasalahan dalam hal pengendalian inflasi pangan di Kabupaten Tanah Laut.
5. Pada Desember 2024, ada beberapa kegiatan yang cukup besar seperti Rangkaian Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut ke-59, Hari Besar Keagamaan Natal, Tahun Baru, dan Persiapan Haul Guru Sekumpul, sehingga permintaan kebutuhan bahan pokok cukup meningkat.
6. Adapun faktor lain penyebab terjadinya inflasi adalah perubahan cuaca, dimana berdampak pada resisten harga angkut pasokan dari Jawa, masuknya musim penghujan membuat komoditi sayuran yg telah dipetik rawan rusak dan kenaikan harga emas yang fluktuasi mengikuti harga emas dinegara lain.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- A. Pelaksanaan kegiatan pasar murah hingga saat ini dirasakan menjadi salah satu cara untuk merespon kenaikan inflasi khususnya kenaikan inflasi m to m. Pelaksanaan operasi pasar di desa - desa sasaran cukup baik dalam rangka meredam peningkatan angka inflasi di Tanah Laut. Melihat pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan operasi pasar yaitu:
  - a. Sasaran individu yang berhak mendapatkan komoditas dari pelaksanaan operasi pasar merupakan individu yang tergolong tidak mampu dan harus diutamakan untuk mendapatkan hak karena mereka yang paling terbebani ketika terjadi kenaikan harga yang tinggi.
  - b. Titik lokasi pelaksanaan operasi pasar, sebaiknya dilaksanakan secara tersebar dan bertempat didaerah paling terdampak.
- B. Penandatanganan kerja sama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam rangka penyediaan komoditas Bawang Merah yang sering menjadi penyumbang inflasi di Tanah Laut diharapkan dapat menjadi solusi dalam rangka memotong rantai distribusi bawang merah.
- C. Komunikasi publik ke masyarakat dapat menjadi salah satu usaha TPID untuk melaksanakan pengendalian harga terutama dari sisi menjaga ekspektasi Masyarakat, salah satunya memanfaatkan pimpinan daerah dan tokoh agama untuk memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengendalikan konsumsinya.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- A. Memperkuat data dan informasi terkait pasokan bahan pokok dan penting, terutama neraca pangan startegis
- B. optimalisasi pelaksanaan pantauan pasar dan pelaksanaan pasar murah di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Laut
- C. Membangun ketahanan pangan masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan/lahan tidur

Mengalokasikan anggaran untuk pelatihan petani bawang merah ke ke Kabupaten

D.

Probolinggo dalam rangka implementasi tindak lanjut Kerjasama bawang merah antara Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Probolinggo.

- E. Mengajukan usulan alokasi kegiatan cetak sawah secara swakelola kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian seluas 36 ribu hektar.
- F. Mengajukan kerjasama dengan pihak Bank Indonesia dalam rangka realisasi KAD dengan pihak kabupaten Probolinggo yaitu mendatangkan komoditas bawang merah dengan biaya angkut di bantu pihak Bank Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan
- G. Pemkab dalam waktu dekat akan melaksanakan FGD spesifik dengan pinsar, disnak, diskopdag, bag.ekonomi, bulog & dishub untuk membahas pemotongan mata rantai pasok tersebut.
- H. Sebagai bentuk upaya memastikan ketersediaan bapok menjelang nataru 2024, TPID Tanah Laut pada tanggal 22 Desember 2024 ini akan melaksanakan survey pasar untuk cek stock dan harga bahan pokok dipasar pelaihari & beberapa pergudangan pedagang. akan melibatkan forkompimda & SKPD terkait.